

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

TUGAS :

Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lemt

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lembaga lain
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
- e. Pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pemerintahan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /Formuasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai IKM dengan kategori baik	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan survey kepuasan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP KEMENPAN dan RB RI	Laporan Hasil Evaluasi
		Nilai LPPD	Nilai LPPD KEMNDAGRI RI	Laporan
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses oleh ULP	$\frac{\text{Jumlah PBJ yang diproses oleh ULP}}{\text{Jumlah PBJ yang dimasukkan oleh OPD ke ULP}} \times 100 \%$	Laporan
3	Peningkatan pengelolaan produk hukum	Prosentase produk hukum daerah yang baik	$\frac{\text{Jumlah Produk hukum daerah yang baik}}{\text{Jumlah Produk hukum daerah}} \times 100 \%$	Laporan
4	Peningkatan penyelesaian hukum	Prosentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan hukum yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Permasalahan hukum}} \times 100 \%$	Laporan
5	Meningkatnya potensi perekonomian Daerah	Jumlah kebijakan peningkatan potensi perekonomian daerah	Jumlah Kebijakan	Laporan
6	Penguatan Lembaga Keagamaan	Prosentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan	$\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah / Lembaga Keagamaan yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah Tempat Ibadah / Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal}} \times 100 \%$	Laporan
	Terwujudnya Fasilitasi keagamaan yang akuntabel	Prosentase pelaksanaan kegiatan keagamaan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang ada}} \times 100 \%$	Laporan

bagi lain;

Penanggung Jawab
Bagian Umum
Bagian Humas & Protokol
Bagian Organisasi
Bagian Pemerintahan
Bagian Pembangunan
Bagian Hukum
Bagian Hukum
Bagian Perekonomian
Bagian Kesra
Bagian Kesra